

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perjalanan hidup manusia sejak lahir sampai akhir hayatnya, merupakan suatu mata rantai peristiwa yang banyak mengandung arti, sehingga nilai-nilai kehidupan merupakan gambaran pribadi-pribadi seseorang antara satu dengan yang lainnya adalah berbeda. Nilai-nilai hidup perlu diabadikan dan dijunjung tinggi agar dapat dijadikan tauladan dan panutan bagi generasi penerusnya. Bagi seorang tokoh yang banyak berjasa kepada bangsa dan Negara, pengabdian dan kehidupan pribadinya sangat perlu untuk ditulis yaitu melalui penulisan peranan A.H. Nasution dalam pemerintahan Soekarno tahun 1965-1966. Jenderal Besar Dr. Abdul Haris Nasution adalah salah satu tokoh guru bangsa dan cendikiawan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) di mana beliau semasa hidupnya berjuang demi bangsa dan Negara.

Berbicara peranan beliau di dalam perjuangannya, menegakan dan membela Bangsa sangat besar, bahkan dalam perjuangannya membebaskan bangsa Indonesia dari cengkaman penjajah. Sejarah telah membuktikan TNI merupakan potensi utama yang turut menentukan kebebasan bangsa dari penjajahan. Sulit kiranya Indonesia terbebas dari penjajah.

Periode tahun 1960-1965, terdapat polarisasi yang kian menajam antara kelompok kiri dan kanan. Partai Komunis Indonesia (PKI) mendominasi kelompok kiri. PKI menjadi satu-satunya kekuatan komunis di Indonesia. Di sisi kanan dalam neraca keseimbangan politik Indonesia, terdapat militer Angkatan Darat (AD) yang berafiliasi dengan pemuka-pemuka Islam.

Konflik AD-PKI beberapa kali terjadi, sehingga kedua belah pihak pun saling memasang kuda-kuda, dan berbagai isu pun mencuat ke permukaan.¹

PKI melakukan provokasi terhadap Angkatan Darat terutama kepada jajaran perwira tingginya. PKI mengatakan bahwa para Jenderal AD merupakan salah satu unsur “kapitalis-birokrat” (kabir) atau pejabat-pejabat AD merupakan salah satu unsur dari “tujuh setan kota”, keduanya harus diganyang karena menghambat jalannya revolusi. Dalam tahun 1964 hingga awal tahun 1965 ketegangan antara PKI dan AD semakin tinggi dan memungkinkan mengarah pada konflik terbuka.² Perkembangan peta politik Indonesia tidak pernah lepas dari dialektika kepentingan politik, dimana Presiden Soekarno menjadi tokoh yang dibutuhkan. Angkatan Darat membutuhkan Soekarno dalam menghadapi Demokrasi Parlementer, sedangkan PKI membutuhkan Soekarno untuk melindungi kepentingan politik mereka.

Menjelang 30 September 1965, berbagai isu serius bermunculan ke permukaan, yang sangat mengancam keseimbangan politik dan keamanan. Diantaranya yaitu dengan adanya mobilisasi buruh dan petani oleh PKI kedalam Angkatan Kelima, Perdana Menteri Republik Rakyat China, Chou En Lai, sudah menjanjikan 100 ribu pucuk senjata api ringan untuk mempersenjatai Angkatan Kelima Indonesia, yaitu Angkatan buruh dan tani. Kalau ini terjadi, sulit dibayangkan apa yang akan terjadi di Indonesia. Angkatan Kelima ini jelas lebih loyal kepada PKI dari pada pimpinan Angkatan Bersenjata.³

Isu paling panas yang bergulir pada Mei 1965, adalah mengenai Isu Dewan Jenderal. Dalam rangka mendiskreditkan TNI-AD, PKI melancarkan isu Dewan Jenderal. Isu Dewan Jenderal diciptakan oleh Biro Khusus PKI sebagai bahan perang urat syaraf untuk membuat citra

¹ Endik Koeswoyo, *Siapa Memanfaatkan Letkol Untung?, Mengungkap Konspirasi Gerakan 30 September*, (MedPress, Yogyakarta: 2007), hlm. 4

² Salim Agus, *Seri Biografi Tokoh, Jenderal Besar TNI Abdul Haris Nasution, bapak angkatan darat dan pemersatu bangsa*, (PT Intimedia Ciptanusantara, Jakarta: 1997), hlm. 70

³ Endik Koeswoyo, *Siapa Memanfaatkan Letkol Untung?...*, hlm. 4-5

buruk terhadap pimpinan TNI-AD di mata masyarakat. Isu Dewan Jenderal disebarluaskan melalui anggota-anggota PKI yang angkif bekerja dalam berbagai lingkungan.⁴ Dewan ini diisukan terdiri dari para Jenderal AD dan mereka melakukan penilaian terhadap berbagai kebijakan dari Bung Karno. Bahkan tersebar Isu Dewan Jenderal telah mempersiapkan upaya kudeta. Jenderal Nasution pun disangkut pautkan dengan Dewan Jenderal. Isu ini yang menyebabkan suhu politik di ibukota semakin tinggi.⁵

Isu Dokumen Gillchrist, bersamaan dengan penyebarluasan Isu Dewan Jenderal, tersiar pula isu adanya Dokumen Gillchrist. Gillchrist, yang nama lengkapnya adalah Sir Andrew Gillchrist adalah Duta Besar Inggris di Jakarta yang bertugas pada tahun 1963-1966.⁶ Isu Dokumen Gillchrist ini mengabarkan adanya kolaborasi antara kekuatan kapitalis dengan "our local army friends".⁷ Jika Indonesia benar-benar jatuh ke tangan Komunis, maka kejatuhan Australia tinggal menunggu gilirannya. Begitulah menurut pakar dan analisis politik Barat. Sehingga mereka meyakini bahwa dengan "Sedikit Intervensi" Indonesia bisa dicegah untuk jatuh ke tangan komunis. Maka seperti diyakini banyak pakar, diletupkanlah perang intelegen untuk saling mengadu domba kekuatan-kekuatan politik di Indonesia.

Memasuki tahun 1965, kesehatan Presiden Soekarno mulai memburuk. Ketika menghadiri suatu acara pertemuan tanggal 15 agustus, Presiden mendadak jatuh sakit. Melihat merosotnya kesehatan Presiden, Ketua Central Comitte (CC) PKI, D.N Aidit, kemudian mendatangkan Tim Dokter Cina untuk melakukan pemeriksaan kesehatan Presiden. Dalam pemeriksaan tersebut didapatkan suatu kesimpulan bahwa penyakit Presiden cukup kritis dan ada kemungkinan tidak dapat sembuh. Dalam jangka waktu tidak terlalu lama, Presiden diperkirakan

⁴Moerdiono, *Gerakan 30 September Pemberontakan Partai Komunis Indonesia, Latar Belakang, Aksi, dan Penumpasannya*, (PT Ghalia Indonesia, Jakarta: 1994), hlm. 61

⁵Agus Salim, *Seri Biografi Tokoh, Jenderal Besar TNI...*, hlm. 70-71

⁶Moerdiono, *Gerakan 30 September Pemberontakan Partai Komunis Indonesia...*, hlm. 64

⁷Endik Koeswoyo, *Siapa Memanfaatkan Letkol Untung?...*, hlm. 4

akan lumpuh atau bahkan meninggal dunia.⁸ Dari sinilah gerhana politik di Indonesia semakin memanas.

Gerhana politik dan pemusnahan PKI dimulai dari peristiwa misterius yang terjadi di Jakarta pada malam dini hari tanggal 1 Oktober 1965. Ini juga menandai awal dari akhir kekuasaan Presiden Soekarno dan kemunculan figur nasional, politik dari arsitek masa depan Orde Baru, Soeharto.⁹ Peristiwa yang terjadi pada tanggal 1 Oktober dini hari mulai pukul 04.00 pagi, hampir serempak terjadi aksi penculikan terhadap tujuh Jenderal Angkatan Darat, yaitu salah satunya Jenderal Nasution yang berhasil meloloskan diri dari peristiwa tersebut.¹⁰ Namun putri bungunya Ade Irma Suryani yang baru berusia 5 tahun menjadi sasaran dari keganasan Gerakan 30 September 1965 (G 30 S/PKI) yang ketika itu Ade sedang digendong oleh Mardiyah adik Ipar Nasution karena penasaran ia membuka pintu kamar dan ketika itu pasukan Cakrabirawa yang sudah ada di depan pintu langsung melepaskan tembakan sehingga mengenai Ade Irma.¹¹

Pada saat yang bersamaan, Ajudan A.H. Nasution Letnan Pierre Tendean menjadi sasaran penculikan dalam peristiwa G 30 S/PKI. Ketika itu Pierre yang dibangunkan oleh Yanti dan Suster Alpiyah karena mendengar suara tembakan segera bangun dan keluar sambil membawa senjata tanpa curiga, ia pun diangkut menuju Lubang Buaya oleh Pasukan Cakrabirawa dan disangkanya bahwa Letnan Pierre Tendean adalah Nasution.¹² Menjelang 30 September 1965,

⁸Nugroho Notousanto, *G 30 S PKI*, (Jakarta: 23 Februari 2001), Video.

⁹Asvi Warman Adam, *Sejarah Resmi Indonesia Modern, Versi Orde Baru dan Para Penantangannya*, (Ombak, Yogyakarta: 2013), hlm. 193

¹⁰Darmawan, *Soekarno Memilih Tenggelam Agar Soeharto Muncul*, (Bandung: PT Hikayat Dunia, 2008), hlm. 129

¹¹A.H. Nasution, *Memenuhi Panggilan Tugas, Jilid 6: Masa Kebangkitan Orde Baru*, (Gunung Agung: Jakarta, 1987), hlm 215

¹²TIM PDAT, *Jenderal Tanpa Pasukan Politisi Tanpa Partai: Perjalanan Hidup A.H. Nasution*, (ISAI: Jakarta, 1998), hlm. 161

Nasution tidak merasakan adanya firasat apa pun juga. Soal provokasi, dan fitnah PKI sudah terlalu biasa bagi Nasution.

Nasution berpendapat sebaiknya segera diambil tindakan tegas yang menyeluruh dan menjamin kerjasama antara AD dan angkatan-angkatan lain. Namun Presiden telah memutuskan dan mengumumkan pengoperan komando Angkatan Darat. Presiden menunjuk Asisten III Panglima AD, Mayjen Pranoto, sebagai *caretaker* Panglima AD. Persoalan ini merupakan inti persoalan yang paling penting pada tanggal 1 Oktober 1965. Presiden dianggap telah melakukan intervensi terhadap “order tetap” yang selama ini berlaku dan ditetapkan oleh Jenderal Yani. Yaitu, setiap kali Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) Jenderal Yani pergi ke luar negeri, Panglima Kostrad Mayjen Soeharto lah yang mewakilinya sebagai pejabat Panglima AD. Order tersebut kini dibatalkan oleh Presiden, sekaligus Presiden mengambil alih Komando AD.¹³

Kenyataan bahwa komando atas Angkatan Darat berada di tangan Presiden tidak menyebabkan para senior Angkatan Darat kehilangan cara untuk menghancurkan PKI. Namun upaya gerakan pasukan yang akan digunakan untuk mengejar pelaku penculikan dan pembunuhan masih terkendala karena kekuasaan terhadap Angkatan Darat sudah diambil alih oleh Presiden. Upaya menghancurkan PKI bukan hanya dilakukan oleh Angkatan Darat karena pada saat duduk perkara peristiwa G 30 S/PKI belum lagi jelas, pada tanggal 1 Oktober sudah ada inisiatif dari ketua Nahdatul Ulama Subchan Z.E. dengan mengajak tokoh-tokoh alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) serta Masyumi menghubungi Pangdam Jaya Jenderal Umar Wirahadikusumah serta Ketua G-V Komando Operasi Tertinggi (KOTI) Jenderal Sucipto. Kedua Jenderal tersebut dikenal dekat dengan Nasution bahkan Jenderal Umar pernah menjadi ajudan Nasution ketika Nasution menjabat Panglima Siliwangi.¹⁴

¹³TIM PDAT, *Jenderal Tanpa Pasukan Politisi Tanpa Partai...*, hlm. 165-166

¹⁴Darmawan, *Soekarno Memilih Tenggelam...*, hlm. 148-149

Dalam buku yang ditulis Julius Pour tertulis, bahwa pada tanggal 13 Februari 1967, Jenderal Nasution secara terbuka mencurigai Presiden Soekarno terlibat dalam peristiwa G 30 S/PKI. Minimal Bung Karno telah mengetahui bahwa akan terjadi aksi penculikan terhadap tujuh Jenderal Angkatan Darat.¹⁵ Peristiwa G 30 S/PKI menimbulkan kegoncangan konstelasi politik di Indonesia. Semua unsur-unsur kenegaraan yang tadinya tunduk patuh tanpa reserve di belakang kebijakan Presiden, mulai nampak memutar haluan. Perubahan ini didasarkan adanya dugaan kuat, bahwa Presiden Soekarno berada di pihak G 30 S yang didasarkan bukti keberadaan Presiden di Halim yang dianggap sebagai markas G 30 S/PKI, serta pernyataan Presiden bahwa kejadian pada 1 Oktober 1965 hanyalah “sebuah riak dalam gelombang samudera revolusi” sehingga terkesan membela G 30 S/PKI.¹⁶

Ketika tahun 1966, Presiden berupaya menyingkirkan Nasution dengan jabatan A.H Nasution sebagai Menko Hankam dicabut oleh Presiden dengan alasan Soekarno ingin merombak kabinet dan jabatan Menko Hankam yang diserahkan kepada Soeharto, namun Soeharto yang masih hormat terhadap Nasution langsung Menolak permintaan Bung Karno. Pada akhirnya Presiden mengangkat Jenderal Sarbini sebagai Menko Hankam, dan selebihnya Menteri yang anti PKI malah dicopot sedangkan muka baru yang dimasukkan ke dalam kabinet dikenal dekat dengan PKI.

Kejadian ini membuat marah Nasution, karena merasa tidak diperlakukan dengan adil, dan ketika Jendral Sarbini dan Jendral Mursyid mendatangi kediaman Nasution untuk membicarakan serah terima jabatan, Nasution menjelaskan kepada tamunya bahwa ia tidak akan datang pada saat pelantikan dan tidak akan melakukan serah terima jabatan Menko Hankam. Namun Presiden tetap jalan dengan keputusannya dan merencanakan melakukan pelantikan

¹⁵Julius Pour, *G30S Fakta Atau Rekayasa*, (Kata Hasta Pustaka: Jakarta, 2013), hlm. 378

¹⁶Pikiran Rakjat, 7 Oktober 1965

kabinet pada tanggal 24 Februari 1966. Pada hari dimana akan dilakukan pelantikan, para mahasiswa dan pelajar melakukan di sekitar dan di semua jalan yang menuju istana sehingga tidak ada jalan untuk menuju istana. Tetapi Presiden tidak mau kalah dan tetap melaksanakan rencananya dengan menggunakan helikopter untuk menuju istana. Mendapat berita tersebut para demonstran menjadi emosi dan untuk mencegah kerusuhan, Cakrabirawa terpaksa melepaskan tembakan sehingga salah satu demonstran ada yang tertembak, dan kejadian ini pun dilaporkan kepada Nasution. Tertanggal 25 Februari 1966 dilangsungkan rapat kabinet dan dengan dikeluarkan keputusan Presiden No. 42/Kogam/1966 untuk membubarkan dan melarang organisasi mahasiswa KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia) di seluruh Indonesia dan mahasiswa dilarang berkumpul lebih dari lima orang. Tetapi mahasiswa tidak mengindahkan larangan Presiden dan terus melakukan demonstrasi. Tindakan mahasiswa ini pun dibalas oleh Presiden dengan mengeluarkan perintah menutup kampus Universitas Indonesia (UI).¹⁷

Setelah kejadian tersebut, kegiatan demonstrasi tidak berhenti tetapi semakin meluas dengan pusat kegiatan yang tersebar di beberapa kampus di Jakarta. Di samping meluas, kegiatan demonstrasi juga menjadi lebih terorganisir, karena adanya dukungan logistik yang teratur dari sejumlah tentara Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) dan Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD). Pada tanggal 10 Maret 1966 Presiden mendapatkan kabar bahwa pasukan RPKAD akan menyerbu istana dan pada waktu itu juga Presiden langsung meninggalkan Jakarta menuju istana Bogor.

Pada tanggal 11 Maret Presiden akan melakukan sidang kabinet di Jakarta yang menurut Pangdam Jaya Amir Mahmud situasi pada saat itu aman, namun setelah 10 menit kemudian ketika sidang sedang berjalan ada informasi bahwa ada pasukan liar di sekitar istana dan

¹⁷ Darmawan, MM, *Soekarno Memilih Tenggelam Agar Soeharto Muncul*, (Bandung: PT Hikayat Dunia, 2008). Hal. 179-181

Presiden pun di evakuasi menuju helikopter dan berangkat menuju Istana Bogor. Pada akhirnya Presiden pun membicarakan situasi di Jakarta. Presiden bertanya bagaimana sebaiknya mengatasi keadaan, ketika itu juga Supersemar dibuat dengan memerintahkan para Wakil Perdana Menteri(Waperdam) menulis Surat perintah kepada Jendral Soeharto. Di tengah kegentingan yang diciptakannya sendiri, Bung Karno memberikan kekuasaan yang lebih besar kepada Jendral Soeharto, dan ketika itu Soeharto mengabarkan Supersemar kepada Nasution. Nasution, segera menyusun surat berisi konsep tertulis apa yang harus dilakukan Soeharto setelah mendapatkan Supersemar. Diantaranya Nasution mengusulkan agar Soeharto merombak kabinet dan menyusun kabinet darurat karena dengan surat perintah itu menurut Nasution, secara *de facto* Soeharto sudah memegang kekuasaan pemerintahan, masalah *de jure* hanya tinggal menunggu waktu.¹⁸

Pada tanggal 21 Juni 1966 Nasution terpilih menjabat menjadi ketua MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara) yang dimana jabatan MPRS ini yang menurut UUD 45 adalah lembaga tertinggi Negara yang kedudukannya lebih tinggi dari Presiden. Peralihan itu dimulai pada saat menjelang pembukaan Sidang Umum MPR 1966. Diawali dengan datangnya Alamsyah Ratu Prawiranegara ke kediaman A.H. Nasution. Alamsyah merupakan Kepala Staf Pribadi Waperdam Hankam/Pangad/Pemegang Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret) Letnan Jendral Soeharto. Kedatangannya adalah membawa pesan atasannya (Letnan Jendral Soeharto) yang isinya menyampaikan bahwa pimpinan Angkatan Darat dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia(ABRI) telah memutuskan mencalonkan A.H. Nasution untuk menjadi Ketua MPRS.¹⁹ Sejak terpilihnya A.H. Nasution sebagai Ketua MPRS baru maka sejak itu pula

¹⁸ Darmawan, MM, *Soekarno Memilih Tenggelam Agar Soeharto Muncul*, (Bandung: PT Hikayat Dunia, 2008). Hal. 182-185

¹⁹ Mayor Caj Drs. Prasetyo P, *Biografi Jenderal Besar DR. A.H. Nasution, perjalanan hidup dan pengabdian*". (Disjarahad Bandung, 2009). Hal. 130

dimulai babak baru dimana selama menjabat sebagai Ketua MPRS banyak hal yang strategis yang dilakukan oleh A.H. Nasution. Diantaranya yaitu melancarkan perubahan konstitusional, memproduksi sejumlah ketetapan penting, dan membangun supremasi MPR.

Tahun 1997 pimpinan MPRS melaksanakan Sidang Istimewa antara tanggal 7 s.d 11 Maret yang dimana di dalamnya berkaitan dengan pertanggungjawaban Presiden dan membahas mengenai Pelengkap Nawaksara.²⁰ Menurut Djenderal Nasution (Ketua MPRS), Presiden suatu waktu harus mempertanggung jawabkan 3 tragedi nasional yang tidak bisa lepas dari kebijaksanaan pemerintah di masa lampau, yakni terjadinya “G 30 S/PKI”, kebobrokan ekonomi dan kemerosotan ahlak. KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia) tetap mengakui Bung Karno sebagai Presiden sesuai dengan ketetapan MPRS, akan tetapi KAMI juga menuntut pertanggung jawaban Presiden Soekarno sesuai dengan ketetapan MPRS. Selaku kepala Bangsa dan Exsekutif Negara mempertanggung jawabkan kebobrokan ekonomi dan kebobrokan moral dihadapan MPRS. Sasaran pokok KAMI yaitu penghancuran orde lama yang telah menyelewengkan pelaksanaan Undang-Undang Dasar(UUD) '45 demikian ketua KAMI Zamroni BA. Harapan Ketua MPRS Jenderal Nasution kepada Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia (KASI) juga menyatakan bahwa tugas kewajiban para sarjana dewasa ini adalah terutama memberikan sumbangan kepada perjuangan, pola operasi dan pelaksanaan Orde Baru guna memberikan pengertian Rakyat yang sewajarnya, dan jangan hendaknya menyumbangkan dengan rumusan tentang arti dan isi Orde Baru saja. Hal ini sangat penting artinya untuk menghadapi usaha kontra offensive orde lama yang ingin merebut kembali basis politik dan fisiknya. Hal tersebut dikatakan oleh Jenderal Nasution dalam sambutan tertulisnya dihadapan

²⁰ Mayor Caj Drs. Prasetyo P, *Biografi Jenderal Besar DR. A.H. Nasution, perjalanan hidup dan pengabdian*. (Disjarahad Bandung, 2009). Hal. 137

peserta Musyawarah Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia (KASI) se-Indonesia pada tanggal 24 November 1966 di Bandung.²¹

Presiden memenuhi perintah MPRS itu dengan membuat surat yang diberi nama “*Pelengkap Nawaksara*”. Surat yang merupakan pertanggungjawaban Presiden sebagaimana yang diharuskan oleh Keputusan MPRS Nomor 5/1966 itu disampaikan melalui Sekretaris Militer Presiden Mayor Jenderal Surjo Sumpeno pada tanggal 10 Januari 1967 kepada Ketua MPRS. Pada waktu itu pula A.H Nasution bersama pimpinan MPRS mengadakan Konferensi Pers. Isi jumpa Pers situ antara lain menyebutkan keengganan Presiden bertanggungjawab kepada MPRS dan tentang kesan seakan-akan Pelengkap Nawaksara itu dibuat dengan konsultasi dengan Jendral Soeharto selaku ketua Presidium Kabinet Ampera dan juga para Panglima ABRI.²² Pada minggu pertama Februari 1967 DPR GR bersidang membahas Pelengkap Nawaksara, dan hasilnya Dewan menyetujui usulan resolusi dan memorandum yang diajukan tokoh NU Nuddin Lubis dan kawan-kawan yang isinya menyatakan laporan Pelengkap Nawaksara. Namun, setelah A.H Nasution menerima resolusi dan memorandum itu pada tanggal 14 s.d 16 Februari 1967, Badan pekerja MPRS bersidang dan menolak Pelengkap Nawaksara dan sebagai kelanjutannya dalam rapat itu dasuarakan agar diberlakukan Tap MPRS Nomor XV/1966 yang berarti Jendral Soeharto diangkat menjadi pejabat Presiden.

Dalam ketetapan MPR, tanggal 12 maret No. XXXIII/MPRS/1967, Pimpinan MPRS telah mengeluarkan keputusan untuk mencabut kekuasaan Pemerintahan dari tangan Presiden Soekarno. Keputusan tersebut dikeluarkan pada tanggal 12 maret Minggu siang yang antara lain telah memutuskan pula melarang Presiden Soekarno melakukan kegiatan politik sampai

²¹ Kumpulan Pidato Jenderal Nasution Kabinet Impera 1966 (Disjarahad) “Kumpulan Kliping”

²² Mayor Caj Drs. Prasetyo P, *Biografi Jenderal Besar DR. A.H. Nasution, perjalanan hidup dan pengabdian*. (Disjarahad Bandung, 2009). Hal. 136-137

Pemilihan Umum dan sejak berlakunya ketetapan ini yang menarik kembali mandate MPRS dari Presiden Soekarno serta segala kekuasaan pemerintahan Negara yang diatur dalam UUD '45.²³

B. Rumusan Masalah

Untuk mempermudah pembahasan-pembahasan selanjutnya, maka dibuat perumusan masalah didasarkan dari latar belakang diatas. Adapun rumusan permasalahan ini sebagai berikut:

1. Bagaimana A.H. Nasution pada Pemerintahan Soekarno tahun 1965?
2. Bagaimana Peran dan Pengorbanan A.H. dalam Peristiwa G 30 S/PKI?
3. Bagaimana Peranan A.H. Nasution dalam masa peralihan dari Soekarno ke Soeharto?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui A.H. Nasution pada Pemerintahan Soekarno tahun 1965.
2. Untuk mengetahui peran dan pengorbanan A.H. Nasution dalam peristiwa G 30 S/PKI.
3. Untuk mengetahui peranan A.H. Nasution dalam masa peralihan dari Soekarno ke Soeharto.

D. Metode Penelitian

Penelitian sejarah merupakan penelitian yang mempelajari kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa pada masa lampau, bertujuan untuk membuat suatu rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektif. Hal ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, mengkritik, mengverifikasikan serta mengtesiskan bukti untuk menegakan fakta-fakta dan memperoleh

²³Kliping Pidato Jenderal A.H. Nasution MPRS-DPR GR DSB.. 1967 (Disjarahad)

kesimpulan yang kuat, serta peristiwa tersebut menjadikan ibrah bagi kita dan cerminan bagi kita dalam kegidupan sehari-hari.

Adapun penelitian sejarah ini dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Heuristik

Pada tahapan ini merupakan tahapan pengumpulan data dan kegiatan untuk menghimpun informasi yang dapat digunakan sebagai sumber data.²⁴ Pada tahapan ini, penulis berusaha mencari dan menghimpun sumber-sumber yang dianggap relevan dan dengan bidang kajian atau topik yang akan dibahas. Penulis melakukan observasi langsung kelapangan dengan cara mencari data-data dari Dinas Sejarah TNI-AD dan Arsip Nasional Republik Indonesia, yang didalamnya terdapat berbagi arsip-arsip dan Dokumen penting yang berkaitan dengan objek yang akan dikaji sehingga dapat memberikan informasi terhadap objek yang akan diteliti. Untuk menunjang sumber-sumber lainnya, penulis mencoba mengadakan kunjungan ke beberapa perpustakaan, seperti Perpustakaan Daerah, perpustakaan SESKOAD, Perpustakaan Disjarahad, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, dll.

Adapun sumber yang penulis peroleh disini yang masuk dalam katagori sumber primer yaitu, sumber tulisan yang berupa hasil karya beliau, dan juga sumber visual yang berupa foto beliau dan juga foto kegiatan beliau selama melaksanakan pendidikannya dan ketika menitih karirnya.

Adapun sumber tertulis yang masuk dalam katagori sumber Primer adalah

²⁴E. Kosim, *Metode Sejarah Asas Dan Proses*, (Bandung: UNPAD, 1984), hal 30

- kliping koran yang dikumpulkan dalam sebuah buku yang berjudul Kumpulan Pidato Jenderal A.H. Nasution Kabinet Impera 1966
- kliping Pidato Jenderal A.H. Nasution MPRS-DPRGR dsb 1967
- Koran KOMPAS tahun 1966, 1967
- Koran Berita Yudha tahun 1966

Lampiran-lampiran yang diambil terkait :

1. Photo Copy KEPRES Pemberlakuan SOB (Keputusan Presiden Republik Indonesia Tahun 1958
2. Photo Copy Surat Pribadi Presiden Soekarno tahun 1960
3. Amanat Jenderal Besar DR. A.H. Nasution dalam melepas korban kekejaman PKI
4. Photo Copy KEPRES Jenderal Besar tahun 1997
5. Photo Copy Surat Keputusan Gelar Pahlawan Nasional kepada DR. A.H. Nasution tahun 2002
6. Pesan Moral Jenderal Besar A.H. Nasution
7. Jenderal Besar DR. A.H. Nasution dalam kenangan Ibu Sunarti Nasution
8. Photo Copy Surat Keputusan Penganugrahan Gelar Doktor Honoris Causa dari Mindanao State University Filipina tahun 1971
9. Photo Copy Surat Keputusan Penganugrahan Gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Padjadjaran, Bandung tahun 1962
10. Photo Copy Surat Keputusan Penganugrahan Gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Andalas, Padang tahun 1962
11. Photo Copy Surat Keputusan Penganugrahan Gelar Doktor Honoris Causa dari UISU Medan, tahun 1962

12. Photo Copy Surat Pernyataan Partai Syarikat Islam Indonesia 17 Juni 1966 terhadap Pelaksanaan Sidang Umum ke IV MPRS
13. Photo Copy Surat Pernyataan 29 Maret 1966 tentang Dukungan terhadap Letnan Jenderal Soeharto
14. Photo Copy Surat Kawat : Kilat Partai Indonesia Daerah Tk. I Kalimantan Barat, Pontianak 22 Juni 1966 tentang Terpilihnya DR. A. H. Nasution Menjadi Ketua MPRS
15. Photo Copy Surat Pernyataan P.B. Partindo 7 mei 1966 tentang tanggapan perkembangan terakhir sehubungan dengan penundaan Sidang Pleno MPRS
16. Poto Copy Surat Perihal Sumbangan Laporan Progress Report PJM Presiden Kepada Sidang MPRS, 16 April 1966

Adapun sumber visual yang berupa foto A.H. Nasution dan juga foto-foto kegiatan pendidikan dan penghargaan yang diambil tahun 1933, 1934, 1938, 1940, 1942, 1947, 1965 dan sebagai bukti bahwa masih ada peninggalan dan sumbangsih beliau walau beliau telah wafat.

Adapun sumber yang merupakan buku-buku penunjang dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Biografi Jenderal Besar Dr. A.H. Nasution “Perjalanan Hidup dan Pengabdianya” oleh Tim Penyusun Disjarahad (2009)
2. Jenderal Tanpa Pasukan Politisi Tanpa Partai: Perjalanan Hidup A.H. Nasution (1998) ditulis oleh Tim Pusat Data Dan Analisa Tempo (PDAT).
3. A.H. Nasution: Bisikan Nurani Seorang Jenderal ditulis oleh Drs. Bakri A.G. Teanlean (1997)
4. Seri Biografi Tokoh Jenderal Besar TNI Abdul Haris Nasution: Bapak Angkatan darat dan Pemersatu Bangsa ditulis oleh Agus Salim (1997)

5. Politik Militer Indonesia 1945-1967: Menuju Dwifungsi ABRI, ditulis oleh Sundhaussen (1988)
6. DR. A.H Nasution Memenuhi Panggilan Tugas: Jilid 1-9, merupakan karya pribadi A.H Nasution (1982-1993)
7. Sokarno Memilih Tenggelam Agar Sukarno Muncul ditulis oleh Darmawan MM (2008)
8. Tragedi Soekarno: Dari Kudeta sampai Kematian ditulis oleh Reni Nuryanti (2012)
9. H. Mangil Martowidjojo: Kesaksian Tentang Bung Karno ditulis oleh Julius Pour (1999)
10. Jejak Langkah Pak Harto 1 Oktober-27 Maret 1968, ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI (1991)

2. Kritik

Tahapan ini berupa bagian yang meneliti secara kritis. Pengujian tersebut dilakukan untuk mengetahui otoritas dan kredibilitas dari sumber yang diperoleh.²⁵ Pada tahapan ini yaitu mengkritik ektern dalam sumber tertulis berupa arsip-arsip dan Dokumen yang menyangkut pembahasan beliau, dengan mengetahui asli atau tidaknya sumber tertulis tersebut dari segi fisiknya. Penulis memperoleh sumber tertulis tersebut dalam bentuk arsip dan dokumen, karena itu untuk mengetahui keaslian buku tersebut dengan mengetahui apakah benar naskah yang ditulis benar mengenai A.H. Nasution, kapan ditulisnya, isi naskahnya seperti apa, dan sebagainya. Sedangkan pada kritik intern penulis mempertanyakan kembali keaslian naskah yang ditulis mengenai A.H. Nasution kepada pihak keluarga A.H. Nasution.

3. Interpretasi

²⁵E. Kosim, *Metode Sejarah Asas Dan Proses*, (Bandung: UNPAD, 1984). hal 35

Interpretasi merupakan suatu tahapan atau kegiatan menafsirkan fakta-fakta serta menetapkan makna dan saling berhubungan dari fakta-fakta yang diperoleh atau dengan perkataan lain berdasarkan informasi yang diberikan oleh jejak-jejak itu, penulis berusaha membayangkan bagaimana rasanya masa lampau itu.²⁶

Kedudukan dan peranan merupakan unsur-unsur baku dalam sistem lapisan, dan mempunyai arti yang penting bagi sistem sosial. Kedudukan (status) diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial. Kedudukan sosial artinya tempat seseorang secara umum dalam masyarakatnya sehubungan dengan orang-orang lain, dalam arti lingkungan pergaulannya, prestisenya dan hak-hak serta kewajibannya. Sedangkan peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan.

Seorang Jenderal merupakan sebuah gelar yang diberikan kepada seseorang, karena dipandang memiliki kelebihan baik secara moral maupun secara intelektual. A.H. Nasution sebagai sosok Jenderal Besar TNI-AD telah mendapat penghormatan dari masyarakat dilingkungan sekitarnya dan juga bangsa dan rakyat Indonesia. Selain itu dari aktifitasnya sehari-hari beliau termasuk orang yang sangat dihormati oleh kalangan Militer yang sama-sama memiliki pangkat dan derajat sebagai TNI.

Sebagai Tokoh Jenderal terkemuka di Indonesia, beliau memiliki sejarah hidup yang sangat panjang dan menarik untuk dikaji dan kita ikuti dalam kepribadiannya yang sangat bersahaja. A.H. Nasution terlahir dari keluarga religius di daerahnya yang sangat cinta akan ilmu Agama. Kebiasaan keluarga Muslim di Indonesia, khususnya di daerah Sumatra anak-anak kecil sudah dibiasakan dengan ajaran agama, seperti dibiasakan dengan membaca “Bismillah” sejak anak mulai bisa bicara, kebiasaan seorang ayah membawa putra laki-laki pergi ke surau untuk

²⁶E.Kosim, *Metode Sejarah Asas Dan Proses*, (Bandung: UNPAD, 1984). hal 42

sembahyang dan biasanya berkumpul untuk belajar agama yang biasa disebut “Mengaji” telah memberikannya pengetahuan agama Islam.²⁷

Perjuangan-perjuangan dalam pengembangan ilmu mengantarkan beliau menjadi sosok Jenderar TNI yang sangat besar. Bekal ilmu yang diperolehnya telah memberikan peranan yang penting bagi Republik Indonesia.

4. Historiografi

Tahapan Historiografi merupakan tahapan berupa kegiatan penulisan hasil penafsiran atas fakta-fakta dan usaha merekonstruksi masa lampau untuk memberikan jawaban atas masalah-masalah yang telah dirumuskan di atas. Dengan demikian, historiografi adalah tahapan lanjutan dari interpretasi yang kemudian hasilnya dituliskan menjadi kisah yang menarik. Pada tahapan historiografi ini, hasil penafsiran atas fakta-fakta itu kita tuliskan menjadi suatu kisah sejarah yang selaras. Di sinilah kita tiba pada persoalan kemahiran mengarang.

Dengan demikian tahapan di atas telah disusun dengan sebaik-baiknya. Dengan melihat tahapan-tahapan ini tidaklah mengherankan apabila dikatakan bahwa kerja seorang sejarawan untuk menghasilkan sebuah hasil karya ilmiah yang bernilai historis.

Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, dan Langkah-langkah Penelitian.

Bab II A.H. Nasution pada Pemerintahan Soekarno tahun 1965

Bab III Peran dan Pengorbanan A.H. Nasution dalam Peristiwa G 30 S/PKI

²⁷ Mayor Caj Drs. Prasetyo P, *Biografi Jenderal Besar DR. A.H. Nasution, perjalanan hidup dan pengabdian*. (Disjarahad Bandung, 2009). Hal.14

Bab IV Peranan A.H. Nasution dalam masa peralihan Soekarno ke Soeharto

Bab V KESIMPULAN



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG